

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki abad ini, dunia telah menunjukkan banyak perubahan khususnya globalisasi dalam banyaknya aspek kehidupan. Perubahan tersebut berdampak pada semua bidang dan sektor yang terdapat pada kegiatan pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan merupakan cara dasar untuk memperoleh taraf hidup rakyat yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (Mardikanto, 2009).

Menurut Mardikanto (2009), pelaksanaan pembangunan pada saat ini ini telah memasuki taraf yang mengharuskan adanya partisipasi yang lebih besar dari rakyat agar tujuan pembangunan tercapai. Partisipasi rakyat disini bukan hanya sekedar pengarahan tenaga secara sukarela, tetapi sesuatu yang dapat membuat tergeraknya rakyat dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan adanya partisipasi dari rakyat dalam mendukung pembangunan yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, maka pembangunan yang dilaksanakan akan tercapai.

Pembangunan sendiri terdiri dari beberapa sektor yang mendukungnya, salah satunya adalah sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, sektor pertanian termasuk dalam sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Indonesia, seperti dalam hal penambahan devisa Negara, penyerapan tenaga kerja, dan yang paling utama dalam penyediaan pangan.

Keberadaan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan wilayah pedesaan. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam menunjang perekonomian desa-desa yang ada di Indonesia. Akan tetapi, saat ini perkembangan pertanian memiliki berbagai macam masalah seperti perubahan fungsi lahan yang dulunya lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian. Menurut data yang ada, 56.000-60.000 ha per tahun mengalami alih fungsi lahan selama tahun 2002-2010. Ketidakastian harga komoditas pertanian dan mahalnya proses produksi menambah masalah yang ada pada sektor pertanian. Dalam hal ini, petani sebagai pelaku utama dan produsen yang berada ada mata

rantai produksi seringkali mengalami masalah penjualan yang rendah yang berakibat pada pendapatan yang rendah (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2013).

Dalam Laporan Rencana Strategis Kementerian Pertanian (2015) menyebutkan bahwa, rata-rata pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja yang berada di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang bekerja di sektor lain seperti sektor industri dan jasa yang menyebabkan kurang diminatinya pekerjaan di sektor pertanian. Generasi muda sebagai penerus di sektor pertanian lebih memilih jenjang karir yang lebih pasti dan menjanjikan. Kondisi tersebut diperburuk dikarenakan besarnya perubahan lahan pertanian yang menyebabkan usaha yang ada di sektor pertanian tidak dapat memenuhi skala ekonomis yang ada. Selain itu, generasi muda dari rumah tangga petani pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan agribisnis, termasuk dari sisi kemampuan manajerial.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menumbuhkan minat generasi muda salah satunya adalah pengembangan dan pengenalan teknologi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat tani baik itu laki-laki dan perempuan terutama generasi muda sehingga dapat melakukan produksi tingkat *on-farm* dan *off-farm*. Selain itu, adanya akses yang diberikan pada generasi muda khususnya mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SLTA dan perguruan tinggi sehingga dapat membuka usaha di bidang pertanian.

Masalah yang ada dapat diselesaikan dengan berbagai solusi sistim pertanian agribisnis yang dapat menghubungkan antara sektor-sektor yang ada di sistim agribisnis (sektor hulu, sub sistim produksi, dan hilir) ditambah dengan dukungan lainnya. Petani sebagai subjek atau pelaku utama dalam agribisnis menerima berbagai inovasi dan teknologi terkait sistim agribisnis yang ada. Jadi dapat disimpulkan, perkembangan komunitas petani dikarenakan karena adanya peningkatan pada kapasitas komunitas ditandai dengan berhasilnya proses difusi inovasi pertanian agribisnis merupakan keberhasilan di bidang pertanian (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2010).

Dalam meningkatkan keterampilan petani selaku pelaku utama sektor pertanian, telah dikembangkan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). P4S merupakan lembaga yang secara langsung dimiliki oleh petani secara perorangan maupun kelompok dan secara aktif berperan dalam pembangunan pertanian di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan (Renstra Kementan, 2015).

Peraturan Menteri Pertanian No.3 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan kelembagaan pelatihan dalam bentuk pelatihan atau permagangan untuk petani dan masyarakat di wilayahnya, yang memiliki tujuan untuk perkembangan sumber daya manusia pertanian. “P4S sendiri merupakan balai pelatihan yang bersifat non formal dan dikelola oleh petani maju. Jenis pelatihan yang dilaksanakan meliputi magang dan keterampilan teknik pertanian” (Renstra BPPSDMP, 2015).

Dalam pelenyenggaraannya, kelembagaan P4S berkaitan dengan sistem penyuluhan. Sistem penyuluhan adalah semua upaya dalam hal pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha dengan melakukan penyuluhan. Penyuluh dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu a) Penyuluh PNS, terdiri dari pegawai negeri sipil ditunjuk langsung oleh satuan organisasi lingkungan hidup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan penyuluhan, b) Penyuluh Swasta, merupakan penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan, dan c) Penyuluh Swadaya, adalah pelaku utama yang berhasil dalam menjalankan usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh (Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan).

Demi tercapainya tujuan pertanian, maka visi utama pembangunan pertanian mempunyai target, yaitu: 1) tercapainya swasembada dan berkelanjutan, 2) meningkatnya diversifikasi pangan, 3) meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) meningkatnya kesejahteraan petani (BPPSDMP, 2010).

BPPSDMP (2010) juga dijelaskan untuk mewujudkan tujuan pertanian pembangunan pertanian tersebut, dibutuhkan dukungan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian, sistem pelatihan, revitalisasi sistem pertanian, standarisasi, dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis merupakan bentuk dukungan yang dapat dilakukan.

Pemberdayaan masyarakat tani merupakan suatu upaya dalam merubah pola pikir, perilaku dan sikap petani dari subsistem tradisional menjadi berwawasan agribisnis dengan proses pembelajaran berkelanjutan. “Program ini meliputi tiga aspek, yaitu: 1) pemberdayaan sumber daya manusia petani, 2) pemberdayaan kelembagaan petani, dan 3) pemberdayaan usaha tani” (Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya).

Selain penjelasan di atas, pemberdayaan masyarakat tani dapat dikatakan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat tani agar ahli, sehingga dapat menjalankan usaha taninya serta dapat mengorganisasi dirinya sendiri dalam kegiatan agribisnis melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat tani tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga menjadi tugas bersama. Kegiatan belajar mengajar yang terjadi dengan sesama petani selama ini merupakan contoh nyata adanya keterlibatan petani dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian.

Ada beberapa definisi tentang P4S, diantaranya:

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pelatihan pertanian dan pedesaan yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh petani secara swadaya baik perorangan maupun berkelompok dan diharapkan dapat secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam bentuk pelatihan atau permagangan bagi petani dan masyarakat di wilayahnya.

Ini merupakan salah satu contoh peran serta petani, khususnya petani maju dimana usahanya layak dijadikan contoh model oleh petani lainnya dalam mempercepat penerapan teknologi baru di bidang pertanian/agribisnis di tingkat petani dan masyarakat pedesaan (Peraturan Menteri Pertanian No.46 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Berprestasi).

P4S memberikan berbagai layanan konsultasi bagi petani di wilayah sekitarnya, sebagai *partner* dengan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dengan cara pelatihan atau permagangan yang bertujuan mempercepat upaya penyebarluasan serta penerapan inovasi dan teknologi baru bagi petani dan masyarakat yang ada di pedesaan. Pelaksanaan diklat di P4S dilakukan melalui Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dengan menggali permasalahan-permasalahan di petani sekitar P4S.

Dengan adanya peran serta dari kelembagaan tersebut, pemerintah ingin mendorong penumbuhan dan pengembangan P4S guna mempercepat pembangunan pertanian dan pedesaan. Selain itu, pemerintah berupaya untuk memberdayakan P4S melalui pembinaan secara berkelanjutan, dari aspek manajemen pelatihan atau permagangan maupun pengembangan usaha, mengingat kapasitas pengelola P4S yang masih perlu ditingkatkan. Diharapkan dengan upaya yang telah ada, P4S dapat menjadi mitra kerja dengan pemerintah dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia pertanian.

Keberlanjutan P4S tidak hanya menjadi tugas instansi tertentu seperti pemerintah, namun juga diperlukan keikutsertaan dari seluruh sumber daya manusia yang ada pada P4S serta masyarakat sekitar P4S. Produksi yang terjaga keberlanjutannya merupakan salah satu ciri keberhasilan suatu organisasi atau usaha, oleh karena itu P4S ini dituntut untuk menjadi contoh bagi P4S atau lembaga sejenisnya. Dewasa ini, P4S dituntut untuk mandiri dalam menjalankan kegiatan usahatani maupun dalam hal pelatihan atau permagangan yang ada baik dalam hal permodalan, komoditi, dan segala aspek sumber daya ada dalam P4S, sehingga keberlanjutan P4S tidak akan tergantung pada sumber modal yang biasanya diperoleh dari bantuan pemerintah, swasta, CSR, dan bantuan lainnya.

B. Masalah Penelitian

Telah disadari bersama, bahwa sasaran pembangunan paling utama adalah pembangunan manusia. Tujuan pembangunan akan tercapai ditandai dengan perubahan pada diri manusia. Perbaikan masyarakat secara berkelanjutan merupakan pencapaian yang diinginkan. Dengan tercapainya

pembangunan manusia, maka pembangunan fisik dan ekonomi yang dilakukan akan menjadi lebih berarti.

Konsep petani belajar dari petani, pada hakekatnya merupakan praktek pembelajaran di lingkungan masyarakat tani yang telah berlangsung lama dan berkembang secara alamiah. Model pembelajaran petani seperti itu dipercaya memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam pencapaian hasil belajarnya. Hal ini dapat diwujudkan karena didukung dengan tersedianya beberapa kondisi diantaranya, petani lebih mudah belajar karena pengetahuan dan pengalaman disampaikan menggunakan “bahasa” petani, keterampilan yang diperoleh oleh petani dapat dipelajari secara langsung dan dipraktikkan sehingga lebih dipercaya petani yang sedang dalam proses pembelajaran. Dengan adanya keunggulan dari model pembelajaran petani tersebut, petani progresif diakui dan diposisikan sebagai mitra penyuluh dalam praktek penyelenggaraan penyuluhan selama ini.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat tani saat ini, dikarenakan oleh:

Pemberdayaan masyarakat tani merupakan salah satu upaya mewujudkan perubahan pola pikir, perilaku dan sikap petani agar menjadi ahli dalam menjalankan usaha taninya dan mampu mengorganisasi diri dalam kegiatan agribisnis melalui proses pembelajaran secara terus menerus. Pemberdayaan masyarakat tani tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Secara nyata pemberdayaan masyarakat tani telah dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar diantara sesama petani. Kegiatan ini merupakan bentuk konkrit partisipasi petani dalam mengembangkan sumber daya manusia pertanian (Permentan No.46 Tahun 2014).

Banyak program dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan sumber daya masyarakat tani di Indonesia. Selain program yang ada, pemerintah juga membentuk badan dan lembaga yang akan mewadahi dan menunjang kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat tani. Sebagaimana diketahui bersama, mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, karena itu dibutuhkan pelatihan dalam hal peningkatan keterampilan petani. Sarana pelatihan yang dikelola oleh lembaga atau badan instansi yang ada saat ini dirasa masih belum memadai, karena itu dibutuhkan dukungan dari lembaga lain yang berasal dari masyarakat.

Data Badan Statistik tahun 2012 menunjukkan, bahwa 30% masyarakat yang ada telah mengeyam tingkat pendidikan di level perguruan tinggi. Keadaan ini dapat dijadikan sebagai penggerak atau fasilitator secara swadaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat tani. Contohnya adalah P4S yang dikelola oleh petani secara perorangan maupun kelompok dengan kemampuan yang cukup dan untuk bertujuan untuk peningkatan pengetahuan petani (Marianah).

Pada tahun 1990, kelembagaan pelatihan dan permagangan pertanian swadaya mulai tumbuh yang dirintis oleh para petani progresif. Dalam perkembangannya, kelembagaan yang ada kemudian dikenal sebagai Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S). P4S merupakan lembaga yang didirikan dan dikelola oleh petani dalam bentuk pelatihan dan permagangan pertanian yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena itu, dorongan dalam hal peningkatan fungsi P4S dibutuhkan demi tercapainya kaidah-kaidah proses belajar mengajar.

Definisi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) menurut Rusmono (2017), adalah:

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga pendidikan di bidang pertanian dan pedesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani baik secara perorangan maupun kelompok, dan bukan merupakan instansi pemerintah. Pelatih pada P4S pada dasarnya adalah para petani pengelola P4S, yang dapat dibantu oleh para kontaktani sekitar, widyaiswara serta penyuluh pertanian setempat dan tenaga lain yang dianggap perlu. P4S merupakan penyuluh swadaya dari dan oleh petani, oleh karena itu, jika pelatihan dilakukan petani maka akan mudah diduplikasi petani lain, karena keberhasilannya. Jika pelatihan dilakukan oleh petani yang berhasil akan mudah direplikasi yang lain, prinsipnya, pelatihan petani itu langsung dilihat, jika berhasil dapat diikuti.

P4S merupakan salah satu lembaga pertanian di bidang pelatihan atau permagangan pertanian, tidak hanya mengharapkan profit (keuntungan) tetapi juga mempunyai tujuan dalam penyebaran informasi pertanian melalui kegiatan pelatihan atau permagangan. Dalam menjalankan kegiatannya sekaligus mencapai tujuan, P4S dituntut untuk kreatif dan mandiri, dimana usahatani tetap berjalan disamping itu kegiatan pelatihan/permagangan tetap bisa dilaksanakan.

Dalam Permentan No. 33 Tahun 2016, P4S mempunyai prinsip, diantaranya adalah a) **Keswadayaan**, yang berarti P4S dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan, peran dan kemandirian kelembagaan melalui kompetensi dalam mengatasi permasalahan. Contohnya adalah masalah permodalan, dengan prinsip keswadayaan diharapkan P4S dapat mengatasi masalah permodalan yang dihadapi, b) **Keterpaduan**, yaitu penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan bagian integral pembangunan pertanian dan perdesaan secara selaras, serasi dan sinergi. Maksudnya adalah dalam menjalankan visi dan misinya, P4S harus selaras dengan pembangunan pertanian yang ada di daerahnya berada serta serasi dengan pembangunan pertanian pada umumnya, c) **Kemitraan**, dimana kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dalam hal pengembangan sumber daya manusia pertanian (pelaku utama dan pelaku usaha), merupakan rekan kerja pemerintah, d) **Kemanfaatan**, dimana kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan manfaat kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Dengan adanya P4S, diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha lainnya yang ada di sekitarnya maupun pelaku usaha pada umumnya, dan 5) **Berkelanjutan**, dimana kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara terarah dan sistematis untuk mencapai kemandirian. Pada akhirnya, P4S diharapkan menjadi lembaga pelatihan yang berkelanjutan dalam hal pengembangan pertanian pedesaan.

Pemberdayaan kelembagaan P4S perlu dikembangkan, dari segi manajemen pelatihan atau permagangan dan pengembangan usaha. Dimana kontribusinya dalam hal percepatan penerapan teknologi baru bidang pertanian dan agribisnis di tingkat petani dan masyarakat pedesaan dapat meningkat (Permentan No. 46 Tahun 2014).

Perhatian pemerintah terhadap P4S tidak lagi berorientasi pada bantuan dana, namun bagaimana mencoba merubah *mindset* organisasi untuk mandiri dan bereswadaya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berimbang pada kelompok yang dibawahinya. Dalam hal ini, P4S dikatakan sebagai lembaga bisnis sosial. Maksudnya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berorientasi pada pendapatan, P4S juga membawa misi sosial dalam hal

penyebaran teknologi informasi di bidang usahanya. Penyebaran teknologi informasi ini berkaitan dengan prinsip kemanfaatan P4S itu sendiri, yaitu pemberian manfaat bagi masyarakat dan pengguna jasa lainnya.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2015 menyebutkan, bahwa Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) berkembang secara swadaya didorong oleh keinginan petani atau pelaku usaha agribisnis yang berhasil yang bertujuan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai keberhasilan kepada pelaku usaha lainnya melalui proses pelatihan dan permagangan bidang pertanian.

Demi tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang ada, maka diperlukan suatu rancangan model yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan suatu usaha di bidang pertanian. Pengertian model bisnis sendiri adalah:

Model bisnis merupakan sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambah di dunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk, pelayanan, citra, distribusi, dan sumber daya serta infrastruktur. Secara umum, model bisnis adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai, yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba (PPM Manajemen, 2012).

Penerapan model bisnis di perusahaan memiliki beberapa manfaat:

Pertama, memudahkan perencana dan pengambil keputusan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, yang nantinya dapat menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. **Kedua**, dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya. **Ketiga**, dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. **Keempat**, dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya (PPM Manajemen, 2012 dalam Asruddin, 2014).

Model bisnis sosial pada P4S diperlukan untuk merancang keberlanjutan P4S di masa yang akan datang. Penerapan model bisnis pada P4S dapat membantu pengelola maupun pelaku usaha agribisnis untuk mengambil keputusan yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Selain itu, dengan adanya rancangan model bisnis pada P4S menjadi gambaran bagi P4S dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan P4S ke depannya.

Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan pertanian yang luas dan potensi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selain itu, Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan jumlah P4S terbanyak (Nusantaranews, 2012). Menurut data terakhir, jumlah P4S yang ada di Sumatera Barat berjumlah 44 P4S (Lampiran 1). Dari semua P4S yang ada, beberapa diantaranya masih aktif dan tidak aktif. Setelah dilakukan tinjauan ke beberapa daerah secara acak, dan berdasarkan pertimbangan perkembangan usaha dan komoditi yang dihasilkan, maka dipilihlah P4S Dr. M. Natsir dan Santiago yang berada Kabupaten Solok dan P4S Tanjung Lurah yang berada Kabupaten Tanah Datar sebagai tempat penelitian. Alasan pemilihan karena merupakan P4S yang masih aktif sampai saat ini diantara P4S yang aktif lainnya, selain itu juga perbedaan jenis komoditi unggulan yang dihasilkan. Selain itu, P4S yang dipilih merupakan bentukan kelompok tani, bukan perorangan.

Latar belakang penelitian ini untuk menganalisis model bisnis sosial yang ada pada masing-masing P4S dimana masing-masing P4S mempunyai komoditi unggulan yang berbeda, sebagai pusat pelatihan atau permagangan bagi petani yang dibentuk oleh kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan model bisnis sosial yang ada pada P4S yang diteliti.

P4S Dr. M. Natsir yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti merupakan P4S yang bergerak di bidang budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, dan peternakan. Selain itu, P4S Dr. M. Natsir juga melakukan pengolahan hasil pertanian. Pelatihan yang ada pada P4S ini terkait dengan komoditi unggulan mereka yaitu budidaya tanaman hortikultura, budidaya tanaman perkebunan, dan peternakan.

P4S Tanjung Lurah berada di Kabupaten Tanah Datar. P4S ini memiliki komoditi unggulan berupa peternakan sapi. Sapi yang berada di P4S merupakan sapi bantuan pemerintah pada tahun 2012 melalui Program Penyelamatan Betina Produktif. Selain memiliki peternakan sapi, P4S ini juga membuat pupuk kompos organik yang berasal dari kotoran sapi dan pakan ternak dengan memanfaatkan limbah pasar seperti sayur-sayuran, kulit kakao dan bahan lainnya. Pelatihan yang ada di P4S ini terkait dengan komoditi yang diusahakan di P4S yaitu budidaya sapi dan pengolahan limbah peternakan.

P4S Santiago berawal dari kelompok tani Santiago yang terletak di Kabupaten Solok dan memiliki komoditi unggulan beras organik. Pelatihan yang ada pada P4S ini terkait dengan budidaya padi sawah organik dan pembuatan ramuan nabati sebagai pestisida alami. Ketiga P4S di atas merupakan P4S yang masih aktif sampai saat ini.

Dari pernyataan di atas timbul pertanyaan bagaimana cara P4S dalam menjalankan kegiatan usahatani agar menghasilkan pendapatan, namun tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pelatihan pertanian. Kondisi tersebut dimana P4S memperoleh pendapatan dari usahatani yang dijalankannya dan tetap bisa memberikan manfaat pelatihan pertanian bagi pelaku usahatani lain yang berada di sekitar lingkungan P4S.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kajian Model Bisnis Sosial Pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) (Studi Kasus P4S Dr. M. Natsir, Santiago, dan Tanjung Lurah)”**.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kegiatan yang ada pada masing-masing Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).
2. Menyusun dan menganalisis model bisnis kanvas pada masing-masing Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang diteliti.
3. Mengidentifikasi faktor penting yang mempengaruhi berjalannya model bisnis kanvas pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) menggunakan analisis SWOT.

D. Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Sebagai sarana pembanding dalam memperkaya informasi tentang model pengembangan bisnis sosial dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam pengkajian teori dan topik penelitian yang sama.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu alat referensi pertimbangan dalam menganalisis bisnis sosial dan sebagai bahan masukan dalam membuat model strategi pengembangan bisnis sosial, kini dan di masa yang akan datang.

